

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

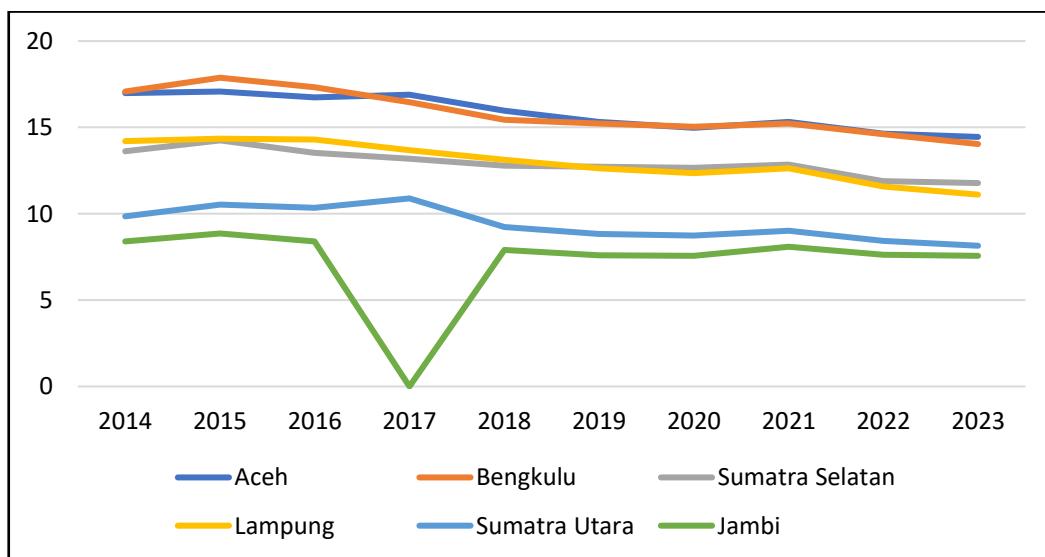
Kemiskinan terjadi apabila individu maupun kelompok berada dalam keterbatasan ekonomi sehingga gagal memenuhi kebutuhan dasar sesuai standar kesejahteraan. Dalam pengertian yang lebih tegas, kemiskinan merujuk pada situasi kekurangan sumber daya finansial maupun barang-barang dasar yang dibutuhkan untuk menopang kelangsungan hidup. Menurut World Bank (2004), kemiskinan terutama dipicu oleh keterbatasan pendapatan serta minimnya kepemilikan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Berbagai faktor membuat mereka mengalami kesulitan guna pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk konsumsi, tempat tinggal, sekaligus akses pendidikan dan layanan kesehatan layak. Selain itu, keadaan kemiskinan juga berhubungan dengan terbatasnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di mana kelompok miskin lebih sering berada dalam kondisi menganggur serta rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan yang mereka rasakan. Oleh karenanya, strategi pengentasan kemiskinan perlu disinergikan dengan penyelesaian masalah pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta aspek lain yang saling berkaitan. Dengan demikian, pendekatan penanggulangannya harus bersifat lintas sektor, melibatkan berbagai aktor, dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Kemiskinan menjadi salah satu topik yang paling sering mendapatkan perhatian dan pembahasan dalam bidang sosial ekonomi. Kemiskinan harus dihadapi oleh semua pemerintahan di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk miskin di suatu negara akan mengakibatkan beban ekonomi makro yang berat. Kondisi ini berimplikasi pada penurunan kualitas hidup masyarakat akibat keterbatasan kemampuan penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar. Maka dari itu, hampir semua pemerintahan di dunia berupaya untuk meminimalkan jumlah penduduk miskin guna mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik bagi rakyatnya (Feryanto et al., 2020).

Secara keseluruhan, Indonesia telah menunjukkan perkembangan dalam mengurangi angka kemiskinan.. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan nasional terjadi penurunan dari 11,25 persen di tahun 2014 menjadi sekitar 9,36 persen di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan arah perbaikan kesejahteraan, meskipun laju penurunannya cenderung melambat pada periode tertentu, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi atau pandemi COVID-19. Tantangan lain yakni masih adanya ketimpangan antarwilayah dalam capaian pengurangan kemiskinan, di mana beberapa provinsi tetap memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Pulau Sumatera termasuk dalam bagian utama dari Indonesia yang kaya akan keragaman budaya serta memiliki banyak sumber daya alam, sehingga menciptakan peluang besar untuk pembangunan dan pengelolaan daerah. Meskipun demikian, keunggulan letak geografis dan variasi bentang alam yang dimiliki pulau ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal dalam pemanfaatannya., persoalan kemiskinan masih menjadi kendala serius bagi perkembangan sosial-ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. merujuk pada data BPS tahun 2022, angka penduduk miskin di Pulau Sumatera tercatat sebanyak 5.763,42 ribu jiwa, sehingga pulau ini menempati urutan kedua setelah Pulau Jawa dalam hal jumlah penduduk miskin terbesar.Dari sepuluh provinsi di Sumatera, empat di antaranya Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung termasuk dalam daftar 15 provinsi dengan persentase kemiskinan terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatera, Aceh merupakan sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 14,75%, disusul Bengkulu sebesar 14,34%, Sumatera Selatan 11,95%, dan Lampung 11,44%.

Grafik berikut menampilkan perubahan jumlah penduduk yang berada dalam kategori miskin pada beberapa provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2014 hingga 2023. Data menunjukkan adanya variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi, baik dari segi jumlah maupun tren perubahannya dari tahun ke tahun. Provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk besar biasanya juga memiliki tingkat penduduk miskin lebih tinggi apabila dibanding dengan provinsi yang memiliki skala ekonomi yang lebih kecil.



Grafik 1. 1 Jumlah penduduk miskin menurut Provinsi (ribu jiwa)

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Grafik 1.1, Selama periode 2014–2023, angka penduduk miskin di berbagai provinsi di Sumatera cenderung terjadi penurunan, tetapi dengan pola dan kecepatan yang berbeda di masing-masing daerah. Aceh dan Bengkulu secara berkelanjutan termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi. Aceh mengalami fluktuasi pada awal periode sebelum menurun dari sekitar 17 persen pada 2014 menjadi sekitar 14 persen pada 2023. Bengkulu menunjukkan kecenderungan yang hampir serupa, dengan kenaikan pada pertengahan periode sebelum kembali menurun secara bertahap hingga berada pada kisaran 14 persen. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang cukup kompleks, meskipun program penanggulangan kemiskinan tetap memberikan dampak positif.

Berbeda dengan dua provinsi tersebut, Sumatera Selatan dan Lampung memperlihatkan penurunan kemiskinan yang lebih stabil. Sumatera Selatan mengalami penurunan dari sekitar 13,6 persen pada 2014 menjadi 11,7 persen pada 2023. Lampung juga memperlihatkan penurunan yang stabil dari sekitar 14 persen menjadi 11 persen selama periode yang sama. Stabilitas ini mengisyaratkan bahwa kedua provinsi tersebut mengalami perbaikan ekonomi yang relatif lebih merata

dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Sumatera Utara dan Jambi menempati posisi sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di wilayah Sumatera. Sumatera Utara berhasil menurunkan kemiskinan dari 9,8 persen pada 2014 menjadi 8,1 persen pada 2023, meskipun terdapat sedikit variasi pada beberapa tahun tertentu. Jambi menunjukkan pola yang serupa dengan tingkat kemiskinan yang rendah dan relatif stabil sepanjang periode pengamatan. Secara keseluruhan, tren penurunan kemiskinan di Sumatera dapat dikaitkan dengan perbaikan kemajuan ekonomi, perbaikan akses terhadap pelayanan dasar, serta implementasi kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Namun, disparitas antarprovinsi masih terlihat, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kontekstual sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pemilihan 6 provinsi dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan relevansi empiris. Berdasarkan data BPS beberapa tahun terakhir, Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Jambi merupakan provinsi yang secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan provinsi Sumatera lainnya, atau memiliki jumlah penduduk miskin terbesar sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap total kemiskinan Pulau Sumatera.

Fokus penelitian diarahkan pada provinsi-provinsi yang secara statistik menunjukkan persoalan kemiskinan paling menonjol, maka penelitian mengenai keterkaitan antara perkembangan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berorientasi pada wilayah yang betul-betul membutuhkan perhatian kebijakan. Pembatasan wilayah penelitian pada enam provinsi ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketajaman analisis serta menghasilkan kesimpulan yang lebih relevan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah Sumatera.

Pertumbuhan ekonomi berperan signifikan menekan kemiskinan. Stabilitas perkembangan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja, menaikkan

pendapatan, dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Namun, efeknya belum berdampak terhadap penurunan kemiskinan ,apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif, terutama ketika lebih banyak muncul di sektor yang membutuhkan modal besar dibandingkan dengan sektor dengan daya serap tenaga kerja yang tinggi Dengan kata lain, pertumbuhan harus diikuti dengan pemerataan agar mampu menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan (Kuncoro, 2013).

Sebaliknya, salah satu indikator yang signifikan, yaitu IPM, memanfaatkan tiga aspek utama untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Peningkatan IPM menunjukkan bahwa kualitas individu dalam masyarakat semakin membaik,yang pada gilirannya memperbesar peluang masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Menurut UNDP (2022), Peningkatan mutu pengembangan sumber daya manusia memacu peningkatan produktivitas kerja dan memperkuat daya saing ekonomi di suatu kawasan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti pendidikan, jumlah penduduk, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kualitas pembangunan manusia. Penelitian Maisyorah (2022), Permana & Pasaribu (2022), serta Aini & Islamy (2021) secara konsisten menemukan bahwa variabel seperti IPM, PDRB, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya memiliki kontribusi signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa dinamika kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan kualitas SDM pada suatu wilayah.

Namun demikian, mayoritas studi sebelumnya masih menitikberatkan pada Indonesia secara nasional, pulau Jawa, atau analisis seluruh provinsi di Sumatera tanpa melihat perbedaan karakteristik antarwilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengisi celah (research gap) dengan menganalisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap kemiskinan secara lebih spesifik pada provinsi-provinsi di Sumatera yang menunjukkan beban kemiskinan paling besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti secara lebih spesifik kaitan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan di Pulau Sumatera. Penelitian menggunakan data periode 2014–2023 agar dapat menggambarkan tren jangka menengah serta mengukur pengaruh kedua variabel independen pada tingkat kemiskinan provinsi -provinsi Sumatera.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama yang akan dibahas dapat dibuat dari penjelasan latar belakang di atas sebagai berikut::

1. Sejauh mana pertumbuhan ekonomi memengaruhi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera?
2. Sejauh mana IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menelaah pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengkaji keterkaitan antara IPM dan kondisi kemiskinan di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat

a. Secara Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian teori ekonomi yang membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, IPM, dan kemiskinan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi di penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.

- b. Secara Praktis
 - 1. Memberi gambaran empiris tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi dan IPM efektif dalam mengurangi kemiskinan bagi pemerintah daerah Pulau Sumatera.
 - 2. Menjadi bagian dari perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, terutama dengan meningkatkan kesempatan kerja, layanan kesehatan, dan pendidikan sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Substansi Penelitian

Penelitian ini membahas efek pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat kemiskinan. Fokus penelitian dibatasi pada analisis hubungan dan pengaruh antarvariabel tersebut, tanpa membahas faktor lain di luar variabel yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dibatasi pada enam provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada ketersediaan dan konsistensi data antarprovinsi selama periode penelitian.

3. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan data tahunan dengan periode pengamatan dari tahun 2014 hingga 2023. Waktu tersebut dipilih untuk menggambarkan perubahan pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat kemiskinan dalam jangka menengah.

4. Ruang Lingkup Data Penelitian

Data yang dianalisis dipenelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Penelitian ini tidak

menggunakan data primer, sehingga analisis tidak dilakukan pada tingkat individu atau rumah tangga, melainkan pada tingkat agregat provinsi.

5. Ruang Lingkup Variabel Penelitian.

Variabel yang dianalisis terdiri dari tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, serta pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel independen. Variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan, seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan belanja pemerintah, tidak dimasukkan dalam model penelitian.

6. Ruang Lingkup Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Analisis difokuskan pada pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik, tanpa menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus mendalam.

